

Hasil Penelitian

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI JAMBI, SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA BANTUAN KEUANGAN

(*VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAM IN JAMBI PROVINCE, BEFORE AND AFTER RECEIVING FINANCIAL AID*)

Mardianis Mardianis, Susi Desmaryani

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Jln. RM Atmadibrata Nomor 1A. Telanai Pura
Jambi - Indonesia
Email: may_mardi@yahoo.co.id

Diterima: 29 November 2020; Direvisi: 12 Mei 2021; Disetujui: 02 Juni 2021

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat masih sangat penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan (BKP2DK) di Provinsi Jambi, merupakan salah satu sumber dana yang memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa/Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan keuangan pada desa di Provinsi Jambi serta mengetahui perbedaan pembangunan sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposif sampling terhadap perangkat desa dan masyarakat di desa se Provinsi Jambi. Sedangkan metode analisis digunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi variabel yang diteliti, serta analisis statistik menggunakan uji beda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan keuangan provinsi bidang infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sementara bidang penguatan kelembagaan lebih banyak dialokasikan untuk petugas syara/guru ngaji. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih kurangnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terdapat beberapa penggunaan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Namun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di desa yang menjadi sampel penelitian.

Kata kunci: bantuan keuangan provinsi, pemerintahan desa, kemiskinan, evaluasi dan pengawasan, keuangan desa

ABSTRACT

The role of the Local Government in improving the people's economy is still very important and is the responsibility of the government in prospering the community. Provincial Government Funding to Villages (BKP2DK) in Jambi Province, is one of the sources of funds that contribute to the implementation of development in the village with the aim of improving the welfare of the community and reducing the number of poor ducking in the village/Kelurahan. This research aims to analyze the implementation of Jambi Provincial Government Funding to Villages in Jambi Province and to find out the differences in development before and after receiving financial funding. The research method used is a quantitative descriptive method with sampling using purposive sampling method against village devices and rural communities in Jambi Province. While the analytical method used descriptive analysis by describing the conditions of the studied variables, and statistical analysis using gaps tests. The findings of this study show that the implementation of Provincial Government Funding in the field of infrastructure is more widely used for the development of BUMDES, while the field of institutional strengthening is more allocated to syara/guru ngaji officers. In this study it was also found that there is still a lack of coaching and supervision roles carried out by the Provincial and Regency/City Evaluation Teams so that there

are some uses of financial assistance that have not been in accordance with the instructions that have been established. However, Jambi province's funding was able to improve the welfare of the villagers judging by the dwindling number of poor people and the number of poor families, as well as the increasing number of Village Owned Enterprises (BUMDES) and Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) in the village that sampled the research.

Keywords: provincial loan fund, village administration, poverty, evaluation and supervision, village finance

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya menitikberatkan pada pembangunan di desa dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan nawa cita yang tertuang dalam misi Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mendukung misi tersebut maka desa dalam melaksanakan pemerintahannya memperoleh bantuan keuangan berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan bentuk dana hibah yang semuanya bantuan tersebut bertujuan untuk membangun desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sinkronisasi program-program pembangunan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut tergambar didalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi 2016-2021. Dokumen RPJMD akan menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi.

Dalam mendukung program nasional, Pemerintah Provinsi menciptakan program bantuan keuangan kepada desa dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menindaklanjuti hal dimaksud Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program bantuan keuangan kepada desa, melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Nomor 28 tahun 2017. Dalam Peraturan Gubernur dimaksud diatur tentang pelaksanaan koordinasi dibentuk Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten melalui Surat Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sesuai kewenangannya, yang di ketuai oleh perangkat daerah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan pemerintah kota

adalah bidang yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya sampai dengan Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan telah berjalan selama 2 (dua) sejak TA. 2017, dengan besaran Bantuan Keuangan Provinsi kepada setiap desa/kelurahan adalah Rp.60.000.000.- / tahun (Pemerintah Provinsi Jambi, 2017).

Sesuai dengan peraturan gubernur yang menjadi petunjuk pelaksanaan disebutkan bahwa bantuan keuangan provinsi digunakan untuk kegiatan yang tidak di danai oleh dana lainnya seperti PAD Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil serta sumber pendapatan desa lainnya atau untuk kegiatan yang telah didanai oleh berbagai sumber keuangan desa namun memiliki output dan sasaran yang berbeda. Hal ini mensyaratkan bahwa bantuan keuangan provinsi harus menunjukkan output atau hasil yang terpisah dari sumber-sumber keuangan desa yang lain. Berdasarkan data pada RPJMD (Pemerintah Provinsi Jambi, 2016) terdapat 102 (7,29%) desa mandiri, 1.228 (87,78%) desa berkembang dan sebanyak 69 (4,93%) adalah desa tertinggal.

Sedangkan menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2020) jumlah penduduk miskin di pedesaan di Provinsi Jambi pada Maret 2015 sebanyak 181,17 ribu orang atau 7,67% mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Maret 2019 sebanyak 159,24 ribu orang atau 6,53%. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di desa yang mampu mengelola sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan provinsi merupakan salah satu sumber dana yang memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat masih sangat penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan pembangunan dari bawah-keatas (*bottom-up*) ini masyarakat diharapkan dapat terlibat mengelola dan membangun daerahnya masing-masing mulai dari tahapan usulan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Selanjutnya menurut (Goldenberg, 2008) model pembangunan desa yang mayoritas masyarakatnya masih tergantung pada sektor

pertanian, dapat menggunakan model pendekatan tradisional, dimana pembangunan perekonomian desa dilakukan dengan penggunaan instrumen ekonomi dasar di perdesaan, termasuk penggunaan subsidi untuk industri, kegiatan penciptaan lapangan kerja, bantuan untuk pengembangan bisnis kecil dan rumah tangga, pinjaman dan tindakan keuangan lainnya untuk memfasilitasi akses ke modal serta inisiatif untuk meningkatkan investasi di daerah sasaran. Pelaksanaan Program pembangunan perdesaan dan kemiskinan ini juga banyak strategi dan program yang juga telah dilaksanakan di negara lain. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pakistan dan Filipina dalam meningkatkan dan membangun ekonomi lokal agar lebih baik maka sasaran pembangunan kelompok pada kedua negara tersebut adalah masyarakat miskin pedesaan, khususnya bagi perempuan, dan penyandang disabilitas (International Labour Office (ILO), 2005).

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana beberapa hasil penelitian sebelumnya yakni didalam dokumen perencanaan desa masih belum mencantumkan hal tentang kearifan lokal desa (Hilman, 2017). Selanjutnya menurut (Deviyanti, 2013) kendala yang menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan yakni partisipasi masyarakat desa yang menjadi pemikir pembangunan masih kurang. Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh (Matridi *et al.*, 2015) terhadap program Percepatan Pembangunan Desa (PD3K) di Kepulauan Riau yang mengalami kegagalan karena program bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa karena tidak adanya niat baik dari masyarakat dan tidak adanya penegakan hukuman terhadap pelanggaran dari peraturan.

“The research finding shows that concept has failed in reaching the target which has been set early to develop the economy of people in village through P3DK. This happened because the lack of intention of the people to return the loan. Another factor is the punishment was not being taken to those who didn't returned the loan. The recommendation of this paper is the reconstruction of new loan system by focussing on the procedure and mechanism of the program in crucial to be done”

Beberapa kendala yang dialami tersebut menekankan penting dan perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan terhadap desa atau kelurahan yang mendapat bantuan keuangan secara berkelanjutan (Abidin, 2015; Andini and

Arfiyanto, 2016). Adanya evaluasi memberikan manfaat, seperti evaluasi penggunaan dana desa (APBN) menurut (Kusuma, 2017) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa, eksistensi berbagai organisasi kemasyarakatan desa, meningkatkan fasilitas pendidikan, posyandu, PKK dan kegiatan keagamaan. Selanjutnya hasil evaluasi menunjukkan hasil yang cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun dengan anggaran yang terbatas. Dana desa juga telah mampu meningkatkan Infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan/gang serta membuka keterisolasian desa dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja, berusaha maupun mencari pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan (BKP2DK) di Provinsi Jambi, juga terdapat kendala penggunaan dana yang masih belum sesuai dengan petunjuk penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud dan manfaatnya yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan penelitian adalah: 1) bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan pada desa di Povinsi Jambi dan bagaimana perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan; dan, 2) bagaimana pelaksanaan program Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat pedesaan. Sampai saat ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi. Hal ini menjadikan pentingnya untuk dilakukan penelitian tentang progam pembangunan desa dan kelurahan diprovinsi jambi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik responden dari variabel. Caranya adalah dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk melihat apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel yang diteliti kemudian dilakukan pengkategorisasian berdasarkan skor rata-rata untuk setiap indikator. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *multistage* sampel (sampel bertingkat), yaitu menentukan kabupaten, kecamatan dan desa.

Pengambilan sampel wilayah Kabupaten berdasarkan topografi dan keterjangkauan peneliti yaitu membagi Provinsi Jambi menjadi tiga bagian yaitu wilayah timur, barat dan tengah. Untuk wilayah timur sampel wilayah yang dipilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk wilayah bagian tengah sampel yang dipilih adalah Kabupaten Bungo dan Tebo, sedangkan dari wilayah barat diwakili oleh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Pengambilan sampel untuk jumlah kecamatan dan desa yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten dilakukan secara purposive sampling yaitu sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria kemudahan akses untuk mendatangi lokasi penelitian, setelah pengambilan sampel untuk kecamatan, desa dan kelurahan diperoleh maka ditentukan sampel responden yang mewakili masing-masing desa yang terdiri dari Perangkat Desa dan Masyarakat.

Berdasarkan metode pengambil sampel dari banyaknya jumlah populasi menggunakan rumus Slovin, maka sampel desa berjumlah 91 desa, namun terdapat banyaknya kendala dilapangan maka jumlah sampel desa yang terkumpul sebanyak 71 desa yang terdiri dari unsur kepala desa dan kepala Badan Pemsuswaratan Desa berjumlah, sedangkan sampel dari masyarakat yang mewakili masing-masing desa terkumpul sebanyak 255.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian tentang indikator gambaran pelaksanaan program pembangunan desa menggunakan dana bantuan keuangan provinsi dan analisis uji beda untuk mengetahui dampak bantuan keuangan Pemerintahan Provinsi Jambi sebelum dan setelah mendapat bantuan. Analisis uji beda dapat dilakukan untuk melihat pengaruh aspek sosial ekonomi pada pelaksanaan program sebelum dan sesudah dilaksanakan program. Untuk mengevaluasi program bantuan apakah mengalami perubahan pada sosial ekonomi masyarakat setelah mendapat bantuan maka menggunakan analisis Uji-T sampel berhubungan atau *Paired Sample T- Test, Correlated samples*. Untuk itu hipotesis uji beda adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : X_1 = X_2$ Tidak ada perbedaan perkembangan aspek sosial ekonomi sebelum dan sesudah bantuan keuangan provinsi ke desa/ kelurahan
2. $H_a : X_1 \neq X_2$ Ada perbedaan perkembangan aspek sosial ekonomi sebelum

dan sesudah bantuan keuangan Provinsi Jambi

Dengan keputusan :

H_0 ditolak apabila : $Sig > 0,05$ (Tidak signifikan)

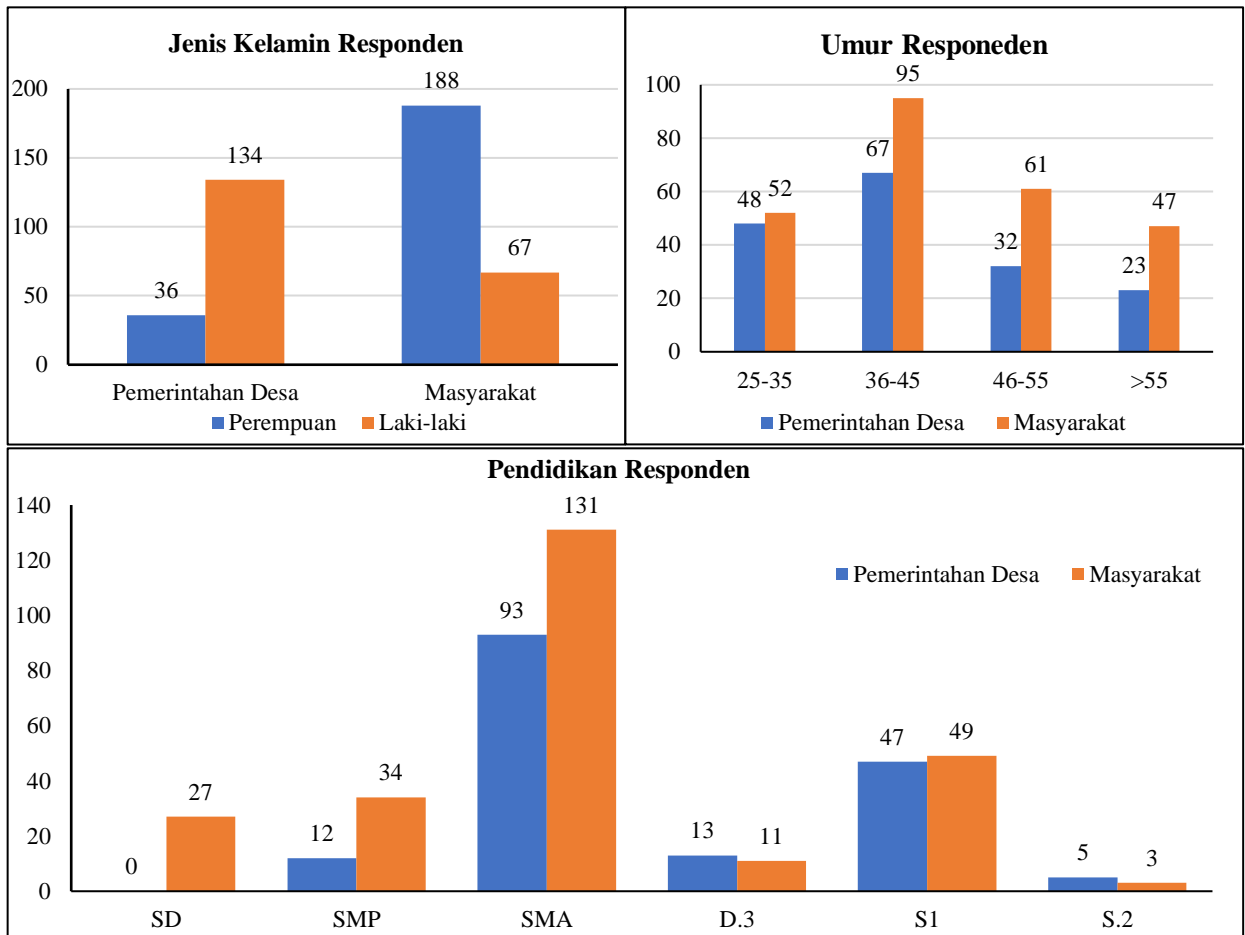
H_a diterima apabila: $Sig \leq 0,05$ (Signifikansi)

: $Sig \leq 0,01$ (sangat signifikan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini tergambar berdasarkan jenis kelamin, Umur dan tingkat pendidikan dilihat dari responden yang berasal pemerintahan desa dan responden yang berasal dari masyarakat. Gambar 1. menjelaskan bahwa kuesioner yang terkumpul yang terbagi menjadi 2 (dua) komponen besar yakni responden dari Pemerintahan Desa sebanyak 170 orang dan responden dari masyarakat 255 Orang. Adapun tingkat pendidikan responden dari pemerintahan desa 55% berpendidikan SMA dan 27% berpendidikan Sarjana (S1). Tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi responden juga sebagian besar atau 52% pendidikan SMA dan 19% pendidikan Sarjana (S1). Usia responden dari pemerintahan desa maupun masyarakat sebagian besar hampir sama di usia 36-45 tahun masing-masing 39% dan 37%. Perbedaan responden pemerintahan desa paling dominan adalah kaum Laki-laki atau sebanyak 79% dan 21% Perempuan, sedangkan responden masyarakat didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 74% dan laki-laki 22%.

Implementasi Program Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi program bantuan keuangan provinsi kepada desa, akan diuraikan melalui metode deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif yang dapat digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa yang melaksanakan program tersebut sebagian besar sudah cukup memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 74% dan 26% menyatakan belum memahami petunjuk yang menjadi acuan pelaksanaan program. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan aparatur desa yang sebagian besar adalah SLTA serta Sarjana seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Identifikasi dan Karakteristik Responden
Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Murina and Rahmawaty, 2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa maka akan semakin meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan desa. Penelitian lain juga menemukan bahwa kurangnya tingkat pendidikan aparatur desa mengakibatkan rendahnya penguasaan komputer, pembukuan, administrasi, teknologi informasi, dan rendahnya penguasaan atas peraturan yang berlaku (Wicaksono, Pamungkas and Anwar, 2019). Selanjutnya penelitian (Mardianis, 2019) juga menegaskan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa yang masih rendah, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa yang masih sering berubah-ubah dan dianggap sebagai *tsunami* regulasi bagi aparatur desa. Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan sangat menentukan pemahaman aparatur desa dalam memahami aturan dan petunjuk pelaksanaan dari bantuan keuangan yang diberikan.

Namun pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa, dari

wawancara dan kuesioner yang disebarakan terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu juga terdapat bantuan keuangan provinsi yang seharusnya ditujukan kepada Desa dan Kelurahan se Provinsi Jambi, dalam pelaksanaannya terdapat Kabupaten/Kota yang hanya menyalurkan dana tersebut untuk desa dan tidak termasuk kelurahan.

Sehingga peran sosialisasi dari pihak terkait pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sangat penting untuk dilaksanakan, guna meminimalisir perbedaan dalam pemahaman terhadap petunjuk yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diani, 2014; Andini and Arfiyanto, 2016) tentang pentingnya sistem pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan secara efektif serta pembinaan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelola keuangan desa.

Tabel 1. Persentase pemanfaatan dana bantuan keuangan provinsi kepada desa tahun 2017 dan tahun 2018

Kegiatan	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1. Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Madrasah / PAUD		
2. Bantuan Anak Yatim		
3. Baju Seragam / Biaya Operasional Lembaga		
4. Pembelian Hewan Ternak (Penguatan Kelembagaan)		
5. Penyelenggaraan Promosi kesehatan GHBS		
6. Pemasangan Keramik di mushala	13,48%	27,54%
7. Kegiatan kepemudaan / Karang Taruna (Olahraga)		
8. Insentif hansip Desa		
9. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
10. Insentif pelatih bola dan pencak silat		
11. Dll		

Sumber: Data diolah (2019)

Guna pembinaan dan pelaksanaan sosialisasi kepada desa/kelurahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi dan administrasi kegiatan. Proses dimaksud memerlukan anggaran pendukung dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan besaran anggaran pendukung untuk kabupaten/kota yang memiliki 200 sampai 300 desa minimal 1,5 % dari total bantuan keuangan Provinsi ke Desa, Kabupaten/Kota yang memiliki 100–200 desa minimal 2% serta kabupaten/kota yang memiliki 50 sampai 100 desa minimal 3 % dari bantuan keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan.

Proses monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi dan administrasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi dapat menganggarkan 5%. Namun dari wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak terkait pada Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa baik provinsi maupun di Kabupaten/Kota, diketahui bahwa belum terdapat anggaran sebagaimana disebutkan didalam ketentuan. Sehingga proses sosialisasi dan pembinaan menjadi terhambat dan tidak efektif dilakukan, karena dilakukan bersamaan “menumpang” dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.

Beberapa kegiatan bantuan keuangan provinsi kepada desa pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan diantaranya terdapat kegiatan seperti pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari beberapa desa yang menjadi sampel penelitian ini, terdapat 13,48% desa pada tahun 2017 belum sepenuhnya mempedomani petunjuk pelaksanaan atau terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana

dilapangan dengan ketentuan pelaksanaan. Sedangkan pada tahun 2018 menjadi 27,54% desa, hal ini terjadinya peningkatan karena terdapat perubahan ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan yang semakin lebih rinci.

Manfaat dan Dampak Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa. Program Bantuan Keuangan Provinsi dan bentuk dana lainnya yang disalurkan kepada desa, semuanya bertujuan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Adapun pemberian bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada Desa dituangkan didalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, membagi bantuan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

Pertama bantuan sebesar Rp.40.000.000,- digunakan untuk pemberdayaan masyarakat; dalam bentuk infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa/kelurahan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa;
- b. Peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
- c. Peningkatan Ketahanan Pangan;
- d. Peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
- e. Pemanfaatan Embung Desa dan sumber air lainnya; dan/atau pemenuhan Sarana Air Bersih dan penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin

Kedua bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan desa/kelurahan, dalam bentuk pengeluaran untuk: a) penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan; b) penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan; c) penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan berupa honorarium, dan pelatihan; d) penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan; e) penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan, f) penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / kelurahan.

Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa penyaluran dana ke RKUD Kabupaten/Kota dilakukan pada akhir tahun atau pada APBD

Perubahan, biasanya pada bulan Oktober sampai Desember. Keterlambatan penyaluran dana ini berdampak kepada penyaluran dan pelaksanaan kegiatan di desa. Sehingga ada sebagian desa yang menjadikan Silpa untuk tahun anggaran selanjutnya. Pada Tabel 2. data penyaluran dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa pada tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel 2. terlihat bahwa terdapat 12,40% dana Bantuan Keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan tahun 2017 masih tersisa dan tersimpan pada RKUD Kabupaten/Kota, yang menjadi Silpa untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Adapun dari data dan pernyataan yang dikumpulkan dari kuesioner persentase pemanfaatan dana bantuan keuangan provinsi kepada desa pada beberapa desa yang menjadi sampel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Realisasi penyaluran bantuan keuangan provinsi kepada desa/kelurahan tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penerimaan dari Provinsi (Rp)	Realisasi Pembayaran (SP2D) (Rp)	Sisa di RKUD Kab./Kota	
				Rp	%
1	Kerinci	17,220,000,000	16,800,000,000	420,000,000	2.44
2	Merangin	12,900,000,000	12,300,000,000	600,000,000	4.65
3	Sarolangun	9,480,000,000	9,480,000,000	-	-
4	Batang Hari	7,440,000,000	-	7,440,000,000	100
5	Muaro Jambi	9,300,000,000	9,000,000,000	300,000,000	3.23
6	Tanjabtim	5,580,000,000	5,580,000,000	-	-
7	Tanjabbar	8,040,000,000	7,020,900,000	1,019,100,000	12.68
8	Tebo	6,720,000,000	6,660,000,000	60,000,000	0.89
9	Bungo	9,180,000,000	8,939,787,050	240,212,950	2.62
10	Kota Jambi	3,720,000,000	2,593,828,011	1,126,171,989	30.27
11	Sungai Penuh	4,140,000,000	3,720,000,000	420,000,000	10.14
JUMLAH		93,720,000,000	82,094,515,061	11,625,484,939	12.40

Sumber: Dinas P3AP2 Provinsi Jambi (2019)

Tabel 3. Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa Tahun 2017 - 2018

No.	Kegiatan	R_2017	R_2018
Penguatan Kelembagaan (Rp. 20.000.000,-/Tahun/Desa)			
1.	Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan Lainnya berupa Honorarium dan Pelatihan;	20,95%	24,68%
2.	Penguatan Lembaga Adat berupa Honorarium dan Pelatihan;	16,19%	22,08%
3.	Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan berupa Honorarium dan Pelatihan;	27,62%	22,08%
4.	Penguatan Kader Dasawisma PKK berupa Honorarium dan Pelatihan;	19,05%	15,58%
5.	Penguatan Kader Posyandu berupa Honorarium dan Pelatihan;	16,19%	15,58%
Pemberdayaan Masyarakat (Rp.40.000.000,-/Tahun/Desa)			
1.	Pembentukan Dan Pengembangan BUMDesa, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Desa;	28,77%	37,70%
2.	Peningkatan Sanitasi Permukiman Berupa Bantuan Jamban Keluarga Untuk Keluarga Miskin, Tempat Sampah Komunal;	12,33%	29,51%
3.	Pemanfaatan Embung Desa dan Sumber Air Lainnya; Dan/Atau Pemenuhan Sarana Air Bersih Dan Penyediaan Air Bersih Bagi Keluarga Miskin	28,77%	21,31%
4.	Peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;	26,03%	6,56%
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan;	4,11%	4,92%

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 3 menjelaskan bahwa pemanfaatan dana untuk Penguatan Kelembagaan sebesar Rp.20.000.000,-/Desa/Tahun oleh pemerintahan desa sejak program diluncurkan paling dominan dimanfaatkan untuk kegiatan Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan Lainnya berupa Honorarium dan Pelatihan, dimana masing-masing pada tahun 2017 sebesar 20,95% dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 24,68%. Sedangkan Kegiatan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan berupa Honorarium dan Pelatihan pada tahun 2017 sebesar 27,62% menurun dibanding tahun 2018 yang hanya 22,08%.

Pada tahun 2018 kegiatan Penguatan Lembaga Adat berupa Honorarium dan Pelatihan; mencapai sebesar 22,08% meningkatkan dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 16,19%. Selanjutnya pemanfaatan dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.40.000.000,-/Tahun/Desa, pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing menggunakan dana tersebut untuk kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa sebesar 28,77% dan 37,70% desa. Selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 28,77% desa sampel memanfaatkan bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah desa untuk pemanfaatan embung desa dan

sumber air lainnya; dan/atau Pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin.

Sedangkan pada tahun 2018 pemanfaatan yang paling banyak kedua oleh desa adalah untuk kegiatan peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal, yakni sebesar 29,51%. Bantuan keuangan provinsi kepada desa dari beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan didalam petunjuk pelaksanaan hanya 4,11% pada tahun 2017 dan 4,92% pada tahun 2018, yang memanfaatkan dana bantuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Kemudian hasil yang dicapai atau dampak berdasarkan jawaban responden perangkat desa tentang perkembangan jumlah penduduk miskin, jumlah keluarga miskin, pertumbuhan BUMDes dan pertumbuhan UMKM disajikan pada tabel 4 menjelaskan perubahan yang terjadi di desa setelah adanya bantuan keuangan dari Provinsi ke desa di Kabupaten. Hasil dari bantuan keuangan berupa keluaran yang tertera pada tabel 4 berupa program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDes, pembangunan gedung BUMDes dan pengembangan usaha.

Tabel 4. Gambaran perubahan pembangunan di pedesaan sebelum-sesudah bantuan keuangan provinsi

No.	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Keluaran	Manfaat	Dampak
1.	Jumlah penduduk miskin < 8%	6687	6149	Pemberdayaan masyarakat	Penurunan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha
2.	Jumlah keluarga miskin < 8%	3174	2926	Pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengembangan ekonomi masyarakat	Penuruan jumlah keluarga miskin	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha
3.	Jumlah Bumdes > 36%	23	36	Modal untuk pengembangan Bumdes, Pembangunan gedung Bumdes	Terjadi peningkatan Bumdes	Meningkatkan ekonomi masyarakat
4.	Jumlah UMKM > 19%	103	123	Pengembangan Modal Usaha	Terjadi peningkatan UMKM	Meningkatkan ekonomi masyarakat

Sumber: Data Olahan (2019)

Perubahan yang diperoleh desa setelah mendapat bantuan keuangan Provinsi Jambi berdasarkan jawaban responden terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 8%, penurunan jumlah keluarga miskin sebesar 8%, peningkatan pembangunan atau pengembangan Bumdes sebesar 36% dan peningkatan jumlah UMKM sebesar 19%. Perubahan pada desa menunjukkan adanya kontribusi dari bantuan keuangan Provinsi ke desa yang didukung oleh pernyataan kepala desa bahwa bantuan keuangan Provinsi dipergunakan untuk pembangunan gedung BUMDES, selain penggunaan lainnya.

Selanjutnya untuk melihat perubahan pembangunan desa dari bantuan keuangan provinsi maka dilakukan uji beda, untuk melihat tanggapan masyarakat tentang pembangunan di desa baik dari pembangunan infrastruktur maupun penguatan kelembagaan. Sebelum dilakukan uji beda maka data telah dilakukan uji normalitas, Hasil uji beda tentang dampak pemberian bantuan keuangan kepada desa dapat dijelaskan pada hasil uji beda yang menggambar perubahan pembangunan di desa baik dari sisi infrastruktur maupun dari penguatan kelembagaan pada tabel 5.

Tabel *paired* sampel statistik diatas menggambarkan kedua sampel yang diteliti yaitu nilai sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Untuk nilai sebelum

batuan diperoleh 2,3752. Sedangkan nilai sesudah menerima bantuan keuangan diperoleh nilai rata-rata hasil pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan sebesar 3,2804. Jumlah masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 255 responden atau masyarakat dengan nilai standar deviasi untuk sebelum menerima bantuan sebesar 0,84596 dan sesudah menerima bantuan sebesar 3,2804.

Karena nilai rata-rata hasil tanggapan masyarakat tentang infrastruktur menjelaskan bahwa setelah bantuan keuangan ada peningkatan pembangunan BUMDES, pembangunan jalan lingkungan, modal untuk masyarakat, bantuan berupa bibit sayur, padi, ikan dan ternak lainnya, peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal dan tersedia sarana air bersih untuk masyarakat (khususnya masyarakat miskin) dibandingkan sebelum penerimaan bantuan keuangan Provinsi kepemerintah desa yang dibuktikan oleh hasil olah data menunjukkan nilai sebelum menerima bantuan < dari Sesudah menerima bantuan atau $3.3752 < 3,2804$. Berarti terjadi perbedaan pembangunan infrastruktur di desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi. Untuk membeuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu dilakukan uji *Paired Sampel Correlation* yang disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 5. Hasil uji beda pemberian bantuan keuangan untuk infrastruktur paired samples statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 sebelum	2,3752	255	,84596	,05298
sesudah	3,2804	255	1,00182	,06274

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 6. Uji korelasi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan infrastruktur

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum & sesudah	255	,469	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 7. Paired Samples Test (Uji perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi untuk pembangunan infra struktur)

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum sesudah	-,90523	,96122	,06019	1,02377	,78669	15,039	254	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 6 menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variable sebelum menerima bantuan keuangan dan sesudah menerima bantuan keuangan. Berdasarkan nilai correlation menjelaskan sebesar 0.469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dikatakan ada hubungan antara variable sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan. Selanjutnya berdasarkan sig (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,000 > 0,05 menjelaskan dengan nilai t hitung -15,039 < -1,96 (uji dua arah) maka H0 ditolak dan menerima Ha, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata sebelum mendapat bantuan keuangan Provinsi dengan sesudah mendapat bantuan keuangan provinsi yang artinya ada pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi untuk pembangunan infrastruktur ke Pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 7 *paired* sampel statistik diatas menggambarkan kedua sampel yang diteliti yaitu nilai sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi ke pemerintah untuk penguatan kelembagaan. Untuk nilai sebelum bantuan diperoleh 2,6451. Sedangkan nilai sesudah menerima bantuan keuangan diperoleh nilai rata-rata hasil pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan sebesar 3,6458. Jumlah masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 255 responden atau

masyarakat dengan nilai standar deviasi untuk sebelum menerima bantuan sebesar 0,89757 dan sesudah menerima bantuan sebesar 0,90855

Karena nilai rata-rata hasil tanggapan masyarakat menjelaskan bahwa setelah bantuan keuangan terjadi peningkatan penguatan kelembagaan diantaranya: 1) ada bantuan penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan; 2) ada bantuan penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan; 3) ada bantuan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan berupa honorarium, dan pelatihan; 4) ada bantuan penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan; 5) ada bantuan penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; 6) ada bantuan keuangan provinsi ada bantuan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan.

Dibandingkan sebelum penerimaan bantuan keuangan Provinsi ke pemerintah desa yang dibuktikan oleh hasil olah data menunjukkan nilai sebelum menerima bantuan lebih kecil dari Sesudah menerima bantuan atau 2,6451 < 3,6458. Berarti ada perbedaan penguatan kelembagaan di desa sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu dilakukan uji *Paired Sampel Correlation*.

Tabel 8. Hasil Uji Beda Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Penguatan Kelembagaan **Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum	2,6451	255	,89757	,05621
sesudah	3,6458	255	,90855	,05690

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 9. Uji korelasi sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan provinsi untuk penguatan kelembagaan

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & sesudah	255	,353	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 10. Uji perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan

Paired Samples Test

Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
-1,00065	-1,02735	-,06434	-1,12735	-,87396	-15,554	254	,000

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 8 diatas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel penguatan kelembagaan sebelum menerima bantuan keuangan dan sesudah menerima bantuan keuangan. Berdasarkan nilai correlation menjelaskan sebesar 0.353 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dikatakan ada hubungan antara variable sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan. Selanjutnya berdasarkan sog (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,000 > 0,05 menjelaskan dengan nilai t hitung $-15,554 < -1,96$ (uji dua arah) , maka H_0 ditolak dan meneima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata sebelum mendapat bantuan keuangan Provinsi dengan sesudah mendapat bantuan keuangan provinsi yang artinya ada pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan ke Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil deskripsi pada tabel 5. dan tabel 6. tentang hasil penilaian menurut persepsi masyarakat/responden menemukan bahwa pengelolaan bantuan keuangan Provinsi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan secara uji deskriptif telah memberi dampak. Hasil uji deskripsi bantuan keuangan untuk infrastruktur menurut pendapat masyarakat menjelaskan sebanyak 61,7 % cukup berdampak sedangkan untuk penguatan kelembagaan sebanyak 69,80 % kategori berdampak baik.

Hasil uji statistik membuktikan bahwa bantuan keuangan Provinsi Jambi mampu memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Jambi yang telah dibuktikan melalui uji beda. Didukung hasil jawaban responden untuk pembangunan Infrastruktur sebanyak 6,20%–6,40% masyarakat menjelaskan bantuan keuangan provinsi cukup berdampak bagi masyarakat melalui pengembangan dan pembentukan BUMDes, pembangunan peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal, tersedianya air bersih dan bantuan modal bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan menurut penilaian masyarakat juga mendukung hasil hitung statistik melalui uji beda. Bahwa masyarakat menjelaskan bahwa terdapat dampak yang baik dari bantuan keuangan Provinsi untuk penguatan kelembagaan yang pelaksanaannya sesuai peraturan gubernur dan petunjuk teknis.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Sari and Abdullah, 2017; Tangkumahat, Panelewen and Mirah, 2017), mereka menemukan bahwa alokasi Dana desa

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di desa. Adanya Dana desa dapat membantu penyediaan fasilitas dan sarana bagi masyarakat pedesaan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang standar kehidupannya sesuai dengan norma-norma, serta masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan materi, sosial, dan spiritual.

Hasil penelitian (Muslihah, Siregar and Sriniyati, 2019) juga mendukung penelitian ini, yang menjelaskan bahwa: 1) bantuan dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik. Adanya Dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan tersebut memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan, 2) Dana desa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Adanya kegiatan pemberdayaan tersebut dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa kontribusi yang terbesar yang memberi dampak melalui uji beda adalah penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi yang di alokasikan untuk penguatan kelembagaan. Hal dibuktikam melalui hasil capaian rata-rata untuk penguatan kelembagaan sebesar -1,00065 dari pada capaian rata-rata pembangunan infrastruktur hanya sebesar -0,90523. Dampak penguatan kelembagaan tersebut lebih banyak pada penguatan petugas syara/guru mengaji. petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan serta program pemberdayaan masyarakat. Padahal alokasi dana untuk penguatan kelembagaan hanya Rp. 20.000.000 lebih kecil dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang besar Rp. 40.000.000. hal ini dikarenakan di asumsikan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dapat merasakan secara langsung untuk honor guru-guru ngaji dan peningkatkan kemampuan masyarakat terutama anak-anak dalam bidang agama.

KESIMPULAN

Implementasi dana bantuan keuangan untuk bidang Infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sedangkan bidang penguatan kelembagaan lebih

banyak dialokasikan untuk penguatan petugas syara'/guru ngaji. Fungsi Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran khusus pada Dinas PMD Kabupaten/Kota serta Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Evaluasi dan Monitoring serta pelaporan yang terkait dengan program Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan. Hal ini juga berdampak adanya permasalahan pemanfaatan dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa belum sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Masih terdapat prosedur kegiatan dalam penyaluran bantuan keuangan Provinsi ke Desa, yang belum sinkron antara peraturan gubernur dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Kabupaten/Kota. Sehingga implementasi bantuan keuangan provinsi mengalami kendala teknis, sering terlambat. Pemanfaatan bantuan keuangan Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah BUMDES dan UMKM di desa yang menjadi sampel penelitian. Hasil uji statistik melalui uji beda juga menemukan adanya pengaruh penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi pada bidang infrastruktur dan penguatan kelembagaan ke Pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

REKOMENDASI

Rekomendasi hasil dari penelitian ini ditujukan untuk beberapa pihak terkait di sebagai bahan pembuatan kebijakan kedepannya:

1. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Organisasi Perangkat Daerah (Dinas P3AP2, Bappeda dan Bappeda) sebagai pelaksana pembinaan dapat melakukannya secara lebih intensif. Pembinaan yang masih perlu dilakukan terkait dengan penyampaian pelaporan sehingga dapat mempercepat waktu proses pencairan bantuan keuangan kepada RKUD Kabupaten/Kota, serta mempercepat proses realisasi kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintahan desa.
2. Dinas P3AP2 sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, agar dapat melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Jambi terkait dengan pola penyediaan anggaran dimaksud. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi perlu merealisasikan anggaran khusus untuk intensifikasi kegiatan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, monitoring serta

evaluasi bagi Tim Koordinasi melalui Dinas P3AP2 Provinsi Jambi dan Dinas PMD Kabupaten/Kota.

3. Program BKP2DK mempunyai manfaat dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, maka program bantuan keuangan provinsi ke desa menjadi program pemerintah Provinsi yang direkomendasikan untuk terus berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya membangun desa-desa di Provinsi Jambi dan membangun Indonesia secara umum dari pinggiran sesuai dengan program Presiden,

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi Bapak Ir. Azrin, M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Amri Amir, SE., MM. sebagai Tenaga Ahli dalam kegiatan penelitian, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. 2015. 'Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 61-76.

Andini, I. Y. and Arfiyanto, D. 2016. 'Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Karang Cempak', *Eco-Entrepreneur*, 2(2), pp. 43-56.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2020. *Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2020*.

Deviyanti, D. 2013. 'Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah', *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), pp. 380-394.

Diani, D. I. 2014. 'Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, pp. 1-23.

Goldenberg, M. 2008. *A Review of Rural and Regional Development Policies and Programs, Canadian Policy Research Networks*. Ottawa: CPRN Research Associate CPRN. [Online] Dari http://cprn3.library.carleton.ca/documents/49496_EN.pdf [Diakses: 9 September 2020]

Hilman, Y. A. 2017. 'Strategi pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian

organik “shining batu”, *Aristo*, 5(1), pp. 82–100.

International Labour Office (ILO). 2005. *Training for Rural Economic Empowerment (TREE). Expanding Economic Opportunity and Income Security Through Workforce Education, Skills Training, Employment Creation, and Local Economic Development in Pakistan and the Philippines, Fifth Technical Report*. Geneva. [Online] Dari: https://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_083445/lang-en/index.htm [Diakses: 9 September 2020].

Kusuma, A. R. 2017. ‘Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Dembangungan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur’, *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), pp. 112–127.

Mardianis. 2019. ‘Implementasi Siskeudes Secara Online dan Tsunami Regulasi Keuangan Desa (Studi Desa di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)’, in Firdausy, C. M. et al. (eds) *Prosiding Seminar Nasional Bagian I - Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, pp. 1–30.

Matridi, R. A. et al. 2015. ‘An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), pp. 189–197.

Murina, S. and Rahmawaty. 2017. ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), pp. 111–120.

Muslihah, S., Siregar, H. O. and Sriniyati. 2019. ‘Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7 No. 1, J(1), pp. 85–93.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2016. *RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*. Jambi-Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2017. *Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang*

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi. Jambi - Indonesia.

Sari, I. M. and Abdullah, M. F. 2017. ‘Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 34–49.

Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J. and Mirah, A. D. P. 2017. ‘Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas’, *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), p. 335.

Wicaksono, G., Pamungkas, T. S. and Anwar. 2019. ‘Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi’, *FORUM EKONOMI*, 21(1), pp. 12–22.